

Penelitian Pembinaan S2 KPI

LAPORAN PENELITIAN PEMBINAAN S2 KPI

PENGUATAN KOMUNIKASI LINTAS BUDAYA
MELALUI DIKLAT PENYULUH AGAMA
BERBASIS NILAI KEARIFAN LOKAL
DALAM MEMBANGUN MODERASI
BERAGAMA DI SUMATERA
UTARA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

PENELITI:

Dr. Mailin, M.A.

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
TAHUN
2022

Penelitian Pembinaan S2 KPI

LAPORAN PENELITIAN PEMBINAAN S2 KPI

PENGUATAN KOMUNIKASI LINTAS BUDAYA MELALUI DIKLAT
PENYULUH AGAMA BERBASIS NILAI KEARIFAN LOKAL
DALAM MEMBANGUN MODERASI BERAGAMA
DI SUMATERA UTARA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

PENELITI :

Dr. Mailin, M.A.

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
2022

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Penguatan Komunikasi Lintas Budaya Melalui Diklat Penyuluh Agama Berbasis Nilai Kearifan Lokal Dalam Membangun Moderasi Beragama di Sumatera Utara
2. Kluster Penelitian : Penelitian Pembinaan S2 KPI
3. Bidang Keilmuan : Pengembangan Masyarakat Islam
4. Kategori : Mandiri
5. Peneliti : Dr. Mailin, M.A.
6. ID Sinta Ketua : 6198359
7. Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
8. Waktu Penelitian : September s.d November 2022
9. Lokasi Penelitian : UIN Sumatera Utara Medan
10. Biaya Penelitian : Rp10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Sumatera Utara



Dr. Lahmuddin, M.Ed.
NIP. 196204111989021002

Medan, 18 November 2022
Ketua Peneliti

Dr. Mailin, M.A.
NIP. 197709072007102004

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Mailin, M.A.

Jabatan : Ketua Peneliti

Unit Kerja : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan

Alamat : Jl. Pungguk Perumahan Calista City No. 11 Sei Sikambang B,
Kecamatan Medang Sunggal, Medan, Sumatera Utara, 20122

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Penelitian dengan judul "Penguatan Komunikasi Lintas Budaya Melalui Diklat Penyuluh Agama Berbasis Nilai Kearifan Lokal Dalam Membangun Moderasi Beragama di Sumatera Utara" merupakan karya orisinal saya;
2. Jika di kemudian hari ditemukan fakta bahwa judul, jasil atau bagian dari laporan Penelitian saya merupakan karya orang lain dan/ atau plagiasi, maka saya akan bertanggung jawab untuk mengembalikan 100% dana hibah penelitian yang telah saya terima, dan siap mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 18 November 2022
Yang menyatakan,



Dr. Mailin, M.A.
NIP. 197709072007102004

IDENTITAS PENELITIAN

Judul : Penguatan Komunikasi Lintas Budaya Melalui Diklat Penyuluh Agama Berbasis Nilai Kearifan lokal dalam membangun Moderasi beragama di Sumatera Utara

Kluster Penelitian: Penelitian Pembinaan Program studi

Nama Peneliti : Dr. Mailin, MA

NIP : 197709072007102004

NIDN : 2007097701

ID Peneliti : 200709770104970

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Alamat : Jl. Pungguk Perumahan Calista City no 11.
Kel. Sei Sikambing B. Kec. Medan Sunggal.
Kota Medan

No. Hp : 085277830777

Email : mailin@uinsu.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Allah SWT atas penyelesaian laporan penelitian berjudul "Penguatan Komunikasi Lintas Budaya Melalui Diklat Penyuluh Agama Berbasis Nilai Kearifan Lokal dalam Membangun Moderasi Beragama di Sumatera Utara". Shalawat beriring salam senantiasa kepada Rasulullah Saw. semoga kita mendapat syafaat di hari akhirat kelak.

Laporan Penelitian ini di buat sebagai bentuk pertanggungjawaban Bantuan penelitian Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSU Tahun 2022. Terima kasih kami disampaikan kepada Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prof. Dr. Lahmuddin, M,ed, serta seluruh rekan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi IIN Sumatera Utara yang telah membantu peneliti selama proses penyelesaian penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa laporan penelitian ini ini belumlah sempurna, untuk itu penulis harapan sumbang saran dan masukan perbaikan demi kesempurnaan penelitian ini. Akhirkalam, tiada daya dan upaya yang layak dilakukan, kecuali menyerah-kan segala upaya kepada Allah SWT. sembari berharap semoga laporan penelitian ini memberi manfaat bagi kita semua. Amin!

Medan, 16 November 2022

Yang menyatakan,


Dr. Mailin, MA

ABSTRAK

Penelitian ini adalah penelitian terkait Penguatan Komunikasi Lintas Budaya Melalui Diklat Penyuluh Agama Berbasis Nilai Kearifan Lokal dalam Membangun Moderasi beragama di Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Rumusan masalah penelitian ini: Bagaimana pemahaman masyarakat Sumatera Utara akan konsep moderasi beragama? Bagaimana pemerintah mensosialisasikan konsep moderasi beragama pada masyarakat? Serta bagaimana moderasi beragama sejalan dengan Kearifan lokal masyarakat Sumatera Utara? hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami akan konsep moderasi beragama.

Kata Kunci : Moderasi, Kearifan, Komunikasi, Budaya, Agama

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SURAT BEBAS PLAGIASI KATA PENGANTAR ABSTRAK DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang 1
- B. Identifikasi Masalah 3
- C. Batasan Permasalahan.....4
- D. Rumusan Permasalahan..... 4
- E. Tujuan Penelitian 4
- F. Signifikansi Penelitian..... 5
- G. Sistematika pembahasan..... 5

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Konsep Moderasi Beragama..... 7
- B. Kearifan lokal 17
- C. Komunikasi Lintas Budaya19
- D. Penelitian Terdahulu..... 25

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis penelitian.....33
- B. Pendekatan Penelitian..... 33
- C. Tehnik Penetapan Sumber..... 34
- D. Tehnik Analisis Data..... 36.

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Temuan Umum
 - Profil Balai Diklat Medan..... 39
 - Sejarah Sumatera Utara
- B. Temuan Khusus
 - 1. Pemahaman Masyarakat Sumatera Utara Akan Konsep Moderasi Beragama .
 - 2. Sosialisasi Konsep Moderasi Beragama Pada Masyarakat
 - 3. Kearifan Lokal Masyarakat Sumatera Utara

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 63

DAFTAR PUSTAKA 65

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Moderasi beragama adalah salah satu agenda penting pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020, dimana Kementerian Agama sebagai penggerak dan leading sektornya, sebagaimana disampaikan oleh Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin dalam rapat moderasi beragama di Jakarta, Senin 2 maret 2020. Moderasi beragama menjadi bagian dari modal sosial dalam Pembangunan Nasional yang di kukuhkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020- 2024.(Sesneg RI, 2007) Program moderasi beragama diharapkan pemerintah dapat membangun kehidupan harmonis dalam bingkai kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, melalui moderasi beragama dapat membangun kehdupan harmonis melalui cara pandang, sikap dan praktek beragama yang moderat, sehingga dapat memahami substansi ajaran agama, nilai- nilai kemanusiaan, kebudayaan, kebhinnekaan, dan kebangsaan, serta ketaatan pada konstitusi yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perguruan Tinggi sebagai garda terdepan agen perubahan melalui para dosen, seluruh tenaga kependidikan dan mahasiswa menjadi tempat penerapan awal konsep moderasi beragama . Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menekankan pentingnya moderasi beragama di perguruan tinggi. Schingga bisa terwujud tradisi kampus yang egaliter, toleran, dan harmoni. Selain itu dia juga meminta kurikulum dan silabus di perguruan tinggi harus memuat nilai toleransi. Pesan

tersebut disampaikan Yaqut saat membuka Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa baru (PKMB) Universitas Indonesia.

Kajian moderasi beragama yang dilakukan saat ini, melalui penelitian dan kajian lainnya berfokus pada sosialisasi di Lembaga Pendidikan dan masyarakat, sedangkan kajian dalam moderasi beragama dalam pengembangan kurikulum perguruan Tinggi belum dilakukan . lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menemukan bagaimana mengembangkan kurikulum moderasi beragama dalam mata kuliah di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Berbagai penelitian telah dilakukan terkait penerapan konsep moderasi beragama di Perguruan Tinggi, diantaranya dilakukan oleh Yedi Purwanto, Qowaid, Lisa'diyah Ma'arifataini dan Ridwan Fauzi, dengan judul: internalisasi nilai-nilai moderat melalui pendidikan agama Islam di perguruan tinggi negeri.(Purwanto et al., 2019) Penelitian ini membahas internalisasi nilai-nilai Islam moderasi melalui Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi Negeri (PTU). Perlu untuk menginternalisasi moderasi agama, termasuk Islam, dalam masyarakat Indonesia yang plural dengan moto Vinneka Tunggal Ika, dan dalam lingkungan yang dinamis di mana kesalahpahaman dapat merusak sendi-sendi persatuan. Tulisan ini menunjukkan pola internalisasi nilai moderasi melalui mata kuliah PAI di UPI Bandung.

Penelitian moderasi beragama di PTKIN sebelumnya telah dilakukan oleh Hani Hiqmatunnisa dan Ashif Az Zafi dengan judul Menerapkan

Nilai Moderasi Islam pada Pembelajaran Fiqh di PTKIN Menggunakan Konsep Problem Based Learning.(Hiqmatunnisa & Zafi, 2020) artikel ini membahas terkait nilai-nilai moderat penting untuk dipertahankan sebagai kesadaran kolektif umat Islam Indonesia. Hal ini karena akan menjadi ikatan persaudaraan dalam menghadapi kemajemukan tubuh Muslim itu sendiri dan keberagaman pihak lain. Pembelajaran Fiqh merupakan wadah untuk menanamkan nilai moderasi Islam dengan menghadirkan konsep pembelajaran berbasis masalah yang menuntut mahasiswa untuk membuka wawasan yang luas tentang perbedaan hukum Islam yang berlaku di masyarakat. Berada di antara diri sendiri dan bersikap moderat dalam menghadapi perbedaan yang muncul

Penelitian lain dilakukan oleh Saihu dan Marsiti, fokus pada "Pendidikan Karakter dalam Upaya Menangkal Radikalisme di SMA Negeri 3 Kota Depok, Jawa Barat". (Saihu dan Marsiti, 2019) Penelitian ini mengkaji pendidikan Karakter untuk memerangi radikalisme di Negeri 3 Kota Depok menggunakan praktik pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam kurikulum formal dan tersembunyi. Kurikulum formal biasanya diprogram dan dibuat selama IHT di sekolah pada awal tahun ajaran, sedangkan kurikulum tersembunyi tidak dapat memisahkan keduanya untuk pencapaian tujuan pembelajaran seperti penanaman nilai. Oleh karena itu, ikuti ketentuan yang menerapkan kurikulum formal. Sifat keteraturan ditentukan oleh wali kelas di setiap kelas induk. penanaman nilai-nilai karakter disiplin dilakukan pada saat jam pelajaran dengan persetujuan guru mata pelajaran, dan pada saat ulangan atau ulangan harian

penanaman nilai karakter kejujuran, penanaman nilai-nilai keramahan, kesopanan, kesopanan Karakter yang benar dipraktikkan dalam salam di dalam dan di luar kelas, dan pengembangan nilai-nilai pribadi Pendidikan agama dimulai dengan berdoa, membiasakan siswa membaca kitab suci masing-masing agama yang dianut, dan menanamkan nilai-nilai pribadi. Menyanyikan lagu wajib kebangsaan setelah sholat dan menanamkan nilai-nilai karakter cinta kebersihan dan peduli lingkungan menyampaikan cinta tanah air. Menjadwalkan pembersihan kelas, belajar tidak dimulai jika kelas kotor, dll. Ini semua adalah bagian dari kurikulum tersembunyi untuk mencapai kurikulum formal berbasis pendidikan karakter.

Penelitian tentang telaah terhadap konsep Pengarusutamaan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2019-2020 dilakukan oleh Yoga Irama dan Mukhammad Zamzami. Artikel ini merupakan jawaban atas keprihatinan masyarakat bahwa saat ini banyak gerakan radikal yang terus melakukan propaganda dan terorisme. Telah diketahui bahwa kesalahan dalam pemahaman agama mengarah pada sikap dan tindakan yang ekstrim. Jika hal ini dibiarkan, niscaya akan menimbulkan keretakan sosial di kemudian hari. Fenomena ini menjadi isu yang patut ditelaah agar tidak menimbulkan kerancuan di kalangan umat beragama di Indonesia.

Indonesia adalah negara multikultural. Keanekaragamannya meliputi budaya, agama, ras, bahasa, Suku, Tradisi, dll. masyarakat multikultural seperti itu, ketegangan dan bentrokan sering terjadi. Mempengaruhi keharmonisan hidup antar kelompok budaya. Tujuan dari makalah ini adalah Keberagaman Budaya Indonesia, Moderasi

Beragama dalam Keberagaman, dan Peran Pendidik Agama mewujudkan perdamaian nasional di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kehidupan multikultural memerlukan pemahaman dan kesadaran multikultural yang menghargai keragaman; dan Kesiapan untuk memperlakukan semua orang dengan adil. Sikap beragama yang moderat diperlukan dengan cara-cara berikut: Mengakui keberadaan orang lain, bersikap toleran, menghargai dan tidak menghargai perbedaan pendapat. Kekuatan akan melalui kekerasan. Peran Pemerintah, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama perlu mensosialisasikan dan mengembangkan moderasi beragama di masyarakat agar tercapai harmoni dan kedamaian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya terlihat bahwa penelitian yang dilakukan hanya seputar implementasi dan memahami konsep moderasi beragama serta bagaimana pelaksanaannya di Perguruan Tinggi. Penelitian ini akan melengkapi penelitian sebelumnya dengan judul Penguatan Komunikasi Lintas Budaya Melalui Diklat Penyuluh Agama Berbasis Nilai Kearifan lokal dalam membangun Moderasi beragama di Sumatera Utara.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini.

- Bagaimana pemahaman masyarakat akan moderasi beragama ?

- Apakah kearifan lokal dalam masyarakat sejalan dengan konsep moderasi beragama?

- Bagaimana pemerintah melalui penyuluh agama menyampaikan konsep moderasi beragama kepada masyarakat ?

2. Batasan Permasalahan

Adapun batasan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- Peneliti hanya berfokus pada Komunikasi Penyuluh Agama dalam mensosialisasikan Moderasi beragama di Sumatera Utara .

3. Rumusan Permasalahan

Rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Sumatera Utara akan konsep moderasi beragama ?

2. Bagaimana pemerintah mensosialisasikan konsep moderasi beragama pada masyarakat ?

3. Bagaimana konsep moderasi beragama sejalan dengan kearifan lokal masyarakat Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Sumatera Utara akan konsep moderasi beragama .

2. Bagaimana pemerintah mensosialisasikan konsep moderasi beragama pada masyarakat .

3. Bagaimana konsep moderasi beragama dapat sejalan dengan kearifan local masyarakat .

D. Signifikansi Penelitian

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Moderasi Beragama

1. Pengertian Moderasi,

Moderasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), diartikan sebagai penjauhan dari keekstriman dan pengurangan kekerasan. Sedangkan dalam Bahasa Arab kata moderasi diartikan sebagai *tawassuth* (tengah), *i'tidal* (adil), serta *tawazun* (berimbang). Ibnu 'Asyur mendefinisikan kata *wasath* dengan dua definisi. Pertama, didefinisikan secara linguistik, kata *wasath* berarti sesuatu di antaranya, atau sesuatu dengan dua ujung yang berukuran sama. Kedua, definisi istilah, pengertian *wasath* adalah bahwa nilai-nilai Islam dibangun atas dasar kondisi mental yang benar, beriman, tidak berlebihan dalam hal-hal tertentu.. (1984 : 1718) Pengertian kata moderasi jika diartikan kedalam individu yang mengamalkannya adalah mengarah kepada arti yang sama, yakni adil, berarti dalam hal ini yaitu memilih posisi tengah diantara berbagai pilihan-pilihan ekstrem (Kementerian Agama RI, 2019).

Kata moderasi sendiri berasal dari kosakata bahasa Inggris yaitu *moderation*, artinya adalah sikap tengah dan atau sikap tidak berlebihan. Sehingga orang yang moderat mampu menerima perbedaan yang ada, dan percaya bahwa berbeda bukan berarti permusuhan, namun perbedaan adalah suatu keniscayaan yang indah.

Moderasi beragama wajib dipahami sebagai sikap agama yang sejalan antara penghormatan teruntuk praktik agama individu lainnya yang

beragam keyakinan (inklusif) dan pengamalan agama sendiri (eksklusif). Dikarenakan moderasi beragama adalah kunci dari wujud kerukunan, perdamaian, toleransi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Moderasi adalah sikap kebajikan yang membantu tercipta keselarasan sosial dan keseimbangan di dalam kehidupan dan personal, di dalam keluarga dan masyarakat beserta hubungan antar manusia yang lebih luas (Azra, 2020).

Menurut Lukman Hakim Saifuddin, moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsadan bernegara. Hal ini harus dipahami bahwa, yang dimoderasi bukan agamanya, melainkan cara kita beragama.

Hal ini karena ajaran agama sudah pasti moderat. Hanya saja ketika agama membumi, lalu hakikatnya menjadi sesuatu yang dipahami oleh manusia yang terbatas dan relatif. Agama kemudian melahirkan aneka ragam penafsiran dan pemahaman yang berbeda-beda. Oleh karena itu, moderasi beragama merupakan keniscayaan untuk menghindari penafsiran yang berlebihan dan paham keagamaan yang ekstrem, sehingga tidak akan menimbulkan konflik antar umat beragama. (Badan Litbang Dan Diklat Kemenag RI, 2019)

2. Dasar Moderasi Beragama

Indonesia merupakan negara multikultural, artinya mempunyai keanekaragaman budaya, suku dan ras. Indonesia negara yang majemuk memiliki penduduk yang banyak, wilayah yang luas,

kekayaan alam melimpah, beserta kekayaan bahasa dan juga budaya yang begitu beragam. Jika dilihat, Indonesia mempunyai potensi yang besar dan sekaligus juga memiliki permasalahan yang cukup besar juga. Dapat diartikan Indonesia selain besar arah positifnya, besar juga arah negatif atau berbagai permasalahan yang dihadapi. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Berdasarkan keterangan ini, di Indonesia sangat rentan terjadi konflik antar sesama warga negara yang mendasari perbedaan tersebut. Sebagai negara yang berdasarkan Tuhan yang Esa, memiliki tanggung jawab atas segala dinamika keagamaan yang terjadi pada wilayah ini. Mengenai konsep keragaman, hal ini bukan hanya karena faktor teritorial atau hukum alam namun adalah fitrah. Pembentukan berbagai kelompok beragama, kelompok lintas agama sampai pada pembuatan lembaga khusus yang memiliki fokus kajian moderasi beragama adalah langkah konstruktif untuk merancang dan membuat kehidupan yang damai dalam bingkai moderasi beragama.

Di Indonesia kepercayaan atau agama masyarakat Indonesia yang resmi diakui oleh negara yaitu ada enam agama. Islam, Kristen, Katolik, Kristen Protestan, Buddha, Hindu dan Khonghucu. Namun, di luar dari keenam agama resmi tersebut, masih ada paham-paham atau aliran-aliran kepercayaan lainnya. Menganalisis besarnya jumlah tersebut disertai dengan bentang wilayah yang luas, maka tugas selanjutnya adalah menjaga dan merawat kekayaan *immaterial* tersebut agar tetap eksis namun tetap menyesuaikan juga dengan pergerakan dan perkembangan zaman.

Ajaran *wasathiyah* dalam Islam dikenal dengan istilah *wastha* memiliki arti yang dipilih, moderat, adil, rendah hati, istiqamah, mengikuti ajaran yang moderat, baik itu hal yang berkaitan dengan duniawi dan juga akhirat. Jika konsep *wasathiyah* sudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka orang tidak bersikap mempunyai sikap ekstrem. Konsep *wasathiyah* juga dapat dipahami dengan merefleksikan prinsip moderat (*tawassuth*), toleran (*tasamuh*), seimbang (*tawazun*), dan adil (*i'tidal*). Rasulullah Saw. mengajarkan kepada pengikutnya untuk selalu mengambil jalan moderat, yang diyakini sebagai solusi terbaik. Hal ini membuktikan bahwa tradisi Islam sangat moderat. Tentu saja tidak hanya agama Islam yang memiliki tradisi moderat, melainkan juga agama lain, seperti Kristen. Dalam misionaris Kristen pada abad ke-16, moderasi beragama dalam tradisi Kristen, menjadi perspektif untuk menengahi ekstremitas tafsir ajaran Kristen yang dipahami sebagian umatnya. Di antara kiat yang dilakukan adalah interaksi intens antar agama, antar aliran dalam internal agama. Dalam Kristen ada juga istilah "kasih" kepada Allah dan kepada sesama manusia. Kasih merupakan kunci dari sebuah hubungan sosial (Qasim, 2020).

Di dalam Alkitab juga tidak ada ayat yang mengajak untuk peperangan, kekerasan bahkan membuat kerusakan, karena Yesus juga mengajarkan kebajikan. Moderasi beragama juga dapat dilihat dalam perspektif Gereja Katolik. Gereja menyebut umat sebagai "persekutuan iman, harapan dan cinta kasih." Ketiganya menjadi kesatuan pondasi utama orang beriman. Iman yang memberi hidup, memberi dasar kepada harapan dan dinyatakan dalam kasih. Ketiganya bersatu, tetapi tidak semuanya sama (Kementerian Agama RI, 2019).

Dalam ajaran agama Hindu yang paling menonjol dan menjadi landasan dalam moderasi beragama adalah *Moksartham Jagadhita Ya Ca Iti Dharma* yakni seimbang antara lahiriah dan jiwa (*atman*) (Rosidi, 2017). Jika hidup manusia seimbang dia akan mencapai kebahagiaan yang sempurna sehingga akan mencapai moksa. Ajaran agama Hindu lainnya yaitu *Ahimsa*, yang berarti kesadaran untuk tidak membunuh atau menyakiti (Rosidi, 2017). Dalam mengembangkan sikap ini, dibutuhkan kemampuan sikap untuk tidak saling menghina, merendahkan agama dan keyakinan orang lain, dan menganggap agamanya paling benar kemudian dapat berbuat kekerasan bahkan membunuh orang lain yang tidak sepaham. Ajaran agama Hindu lainnya yang berkaitan dengan moderasi beragama adalah *susila*, yaitu bagaimana cara membangun hubungan rukun harmonis antar manusia sebagai anasir ciptaan Tuhan tertinggi (Rosidi, 2017). Kasih sayang juga merupakan hal utama dalam semua agama.

Hindu adalah agama terbesar ketiga di dunia setelah Kristen dan Islam dengan mencakup jumlah penganut sekitar satu miliar orang dengan populasi Hindu terbesar berada di India (dengan 957.636.314 orang pengikut) (Mohammad Zazuli, 2018). Di Indonesia pemeluk agama Hindu paling banyak berada di Bali. Masyarakat Bali juga memiliki tradisi agama Hindu yang unik. Praktik agama yang dilaksanakan umat Hindu Indonesia salah satunya adalah Puja Tri Sandhya dan juga Panca Sembah. Menurut Chanda Mohan selaku pandita di Kuil Dewi Durga MAA Tangerang, Puja Tri Sandhya dilakukan setiap tiga kali sehari yaitu pada pukul enam pagi, dua belas siang dan enam sore. Tujuannya yaitu untuk meminta perlindungan dari Tuhan, memohon

keberkahan, dan lain-lain (Muria Khusnun Nisa, komunikasi personal, 6 April 2021).

Kemudian di dalam tradisi agama Buddha juga terdapat ajaran yang berkaitan dengan moderasi beragama. Pencerahan Sang Buddha berasal dari Siddharta Gautama. Siddharta Gautama merupakan anak seorang raja, namun Siddharta Gautama menginginkan hidup yang sederhana. Dari hasil wawancara oleh umat Buddha di Vihara Karuna Jala, Siddharta Gautama mengikrarkan empat prasetya, yaitu menolong antar makhluk, menolak kemauan yang bersifat duniawi, mempelajari mengamalkan Dharma, serta berusaha untuk meraih Pencerahan Sempurna (Muria Khusnun Nisa, komunikasi personal, 13 Oktober 2021). Di Indonesia, Tuhan dalam agama Buddha biasa dipanggil Sang Hyang Adi Buddha sebagai sebutan Tuhan Yang Maha Esa.

Agama Buddha berasal dari India bagian utara dan diperkirakan telah ada sejak abad ke-6 SM. Agama Buddha masuk di Indonesia melalui jalur laut dan perdagangan. Agama Buddha mencapai masa puncaknya pada era Raja Ashoka (273-232 SM) yang memproklamkan Buddha sebagai agama resmi negara. Selain Stupa, tiang Ashoka juga merupakan bangunan peribadatan populer yang dibangun oleh Raja Asoka. Wilayah kerajaannya meliputi sebagian besar wilayah India. Agama Buddha masuk di Indonesia pada era Kerajaan Sriwijaya di Palembang (650 M) dan kerajaan Majapahit (1293-1500 M) yang berpusat di Jawa Timur (Qasim, 2020).

Buddha juga mengajarkan bahwa spirit agama adalah Metta. Metta dalam Bahasa Pali berarti sikap bersahabat dan tanpa kekerasan.

Dengan metta umat Buddha menghindari segala bentuk keajahatan, kebencian dan permusuhan. Dan diharuskan menumbuhkan rasa persahabatan, kebaikan serta menubar kasih kesejahteraan kepada sesama manusia dan kepada antar makhluk (Asadhananda, 2012). Buddha Dharma merupakan „jalan tengah” yang merupakan aspek penting dari spiritualitas umat Buddha agar terhindar dari ekstremitas untuk menuju pada kebahagiaan sejati.

Agama Khonghucu diperkirakan datang ke Indonesia bersamaan dengan para pedagang Tiongkok sekitar abad ke-3 Masehi. Shishu Wujing merupakan kitab suci Khonghucu. Ajaran Khonghucu yang berkaitan dengan moderasi beragama di antaranya adalah Junzi yang bisa diartikan sebagai tingkat moralitas seseorang. Junzi berarti individu yang telah sampai ke tingkat moral dan intelektual yang tinggi. Menjadi seorang yang Junzi adalah cita-cita para penganut Khonghucu (Sari, 2014). Ketika seseorang sudah mengamalkan aspek-aspek Junzi otomatis individu tersebut telah mengamalkan rasa kasih sayang kepada sesama manusia dan juga sesama makhluk hidup.

Sebagai manusia sebaiknya tetap menjaga agar terus berada dalam batas tengah, supaya selaras. Keharmonisan itulah cara manusia menempuh Dao (jalan suci) di dunia (Kementerian Agama RI, 2019). Dalam buku yang berjudul “Mengetahui Lebih Dekat Agama Khonghucu di Indonesia, terdapat sifat-sifat mulia dalam ajaran Khonghucu. Lima sifat yang mulia (Wu Chang) terdiri dari: 1) Jen/Jin: cinta kasih, halus budi pekerti (sopan santun); 2) I/Gi : rasa solidaritas, membela kebenaran; 3) Li atau Lee : sopan santun; 4) Ce

atau Ti : bijaksana atau kebijaksanaan (wisdom); dan 5) Sin : kepercayaan, dapat menepati janji (Tanggok, 2005)

Dengan demikian, hal yang juga penting untuk mempunyai sikap moderat adalah dengan toleransi. Karena toleransi adalah perilaku untuk memberi tempat dan tidak mengusik individu agama lain untuk berkeyakinan, menyampaikan pendapat, melakukan kepercayaan keyakinannya, walaupun keyakinan agama lain berbeda dengan yang kita anut. Adanya toleransi mengacu pada sikap saling menerima, terbuka, sukarela dan dengan hangat menerima perbedaan. Toleransi selalu berkaitan dengan pola pikir positif.

Dalam memegang teguh kesinambungan, negara sangat berperan penting. Dikarenakan negara akan menjadi penentu arah moderasi dan menjadi salah satu penyangga keadilan. Moderasi beragama berperan dalam mempraktikkan dogma agama, pemeluk agama tidak terkekang secara ekstrem kepada perbedaan untuk bangsa yang plural dan multikultural, Indonesia telah menunjukkan keseimbangan yang wajib menjadi teladan. Walaupun mayoritas pemeluk agama di Indonesia notabene pemeluk agama Islam, tetapi Negara secara seimbang juga memberi fasilitas kepada pemeluk agama lain. Kenyataan ini dapat dilihat diantaranya pada realita bahwa Negara Indonesia merupakan yang paling banyak menetapkan hari libur nasional didasarkan dari hari besar semua agama, dimulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, serta Khonghucu. Berbagai macam ritual budaya, adat istiadat, serta kebiasaan nenek moyang banyak dilestarikan untuk menjaga keseimbangan serta keharmonisan.

Demajemukan merupakan hal yang pasti dikarenakan merupakan kehendak Tuhan, supaya antar individu saling mengenal, menyapa, berkeadilan, dan saling komunikasi. Tentunya hadirnya agama berupaya melindungi, menjaga hak antar masyarakat, berperan serta untuk kebutuhan hidup manusia. Agama berkedudukan penting dalam kehidupan Negara Indonesia. Pengakuan ini tertuang di dalam sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkembangan peradaban kehidupan manusia telah mengantarkannya dalam suatu era yang serba canggih. Hal yang paling terlihat dari perkembangan kecanggihan teknologi adalah perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dengan munculnya internet yang berjalan sangat cepat dan diikuti dengan hadirnya media sosial. Keleluasaan internet dalam suatu teknologi membuat semakin banyak aplikasi-aplikasi berbasis internet yang turut meramaikan produk tersebut. Media sosial adalah salah satu aplikasi berbasis internet yang paling populer saat ini oleh seluruh kalangan.

Media sosial juga salah satu sarana yang memungkinkan individu untuk bersosialisasi, berinteraksi dan berkomunikasi dibatasi oleh suatu kondisi ruang waktu. Media sosial menunjukkan saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan dapat kontribusi dan hubungan timbal balik secara terbuka, berkomentar, membagikan berbagai informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Media sosial dapat dikatakan sebagai wadah yang mampu memfasilitasi berbagai kegiatan seperti mengintegrasikan interaksi pembuatan konten dan situs web, berbasis komunitas.

Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, yang saat ini memasuki revolusi digital 4.0 dikaitkan dengan disrupsi. Era disrupsi jika kita mudah terpengaruh oleh berita *hoax* maka dapat mengakibatkan perubahan radikal dalam semua aspek kehidupan, termasuk juga bidang kehidupan beragama.

Menurut hasil survei nasional PPIM Jakarta pada tahun 2017, jejaring internet dapat mempengaruhi besar terhadap meningkatnya perilaku tidak toleran pada generasi milenial atau generasi Z. Generasi milenial yang memiliki akses internet lebih bersikap tidak toleran. Sebaliknya, generasi milenial yang tidak mempunyai akses terhadap internet lebih memiliki sikap moderat dan toleran daripada yang memiliki akses internet. Padahal mereka yang memiliki akses internet sangat besar berjumlah 84, 94%, dan sisanya 15,06% siswa/mahasiswa non akses terhadap internet. Sehingga generasi milenial lebih percaya dunia maya sebagai sumber rujukan terhadap pembelajaran agama. Terhitung 54, 37% siswa serta mahasiswa mempelajari pengetahuan beragama dari internet (Kementerian Agama RI, 2019).

Meskipun konten di media sosial lebih menarik dan juga mudah diakses, namun informasi yang benar dan salah bercampur aduk. Apalagi masyarakat Indonesia mudah terprovokasi oleh berita *hoax* tanpa melakukan verifikasi. Sehingga *hoax* dapat didefinisikan sebagai kebohongan yang sangat berbahaya dan menipu orang lain. Maka jika *hoax* tersebut memakai topeng agama, maka dapat menciptakan peperangan.

Selain dapat menyebarkan berita *hoax*, internet juga dapat membuat konten-konten kebencian mengatasnamakan agama. Itulah

perkembangan teknologi tempat belajar berganti, khususnya pada masyarakat yang sudah mengenal teknologi. Dahulu, jika ingin belajar agama harus di sekolah atau tempat mengaji dan pesantren, namun sekarang ada yang dikenal dengan istilah "Mbah Google." Masyarakat digital menjadi terbiasa menemukan informasi atau gambaran kebenaran tunggal tanpa penjelasan dari tokoh agama yang lebih memahami.

Menurut ASN Bimas Islam Kementerian Agama, Mochamad Shobarudin bahwa masyarakat kini sering sekali menyebarkan beritaberita hoax melalui akun media sosial pribadi mereka, seperti Instagram, WhatsApp group, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Pada era disrupsi digital yang semakin canggih saat ini, hendaknya masyarakat harus lebih bijak menggunakan sosial media. Pentingnya literasi tentang moderasi beragama sangat diperlukan khususnya bagi generasi milenial (Muria Khusnun Nisa, komunikasi personal, 5 November 2021).

Fanatisme agama yang mengarah pada eksklusivisme, ekstremisme, bahkan terorisme, adalah akibat dari dangkalnya sumber pengetahuan agama, ada yang bablas menafsirkan isi kitab suci sampai tidak bisa membedakan antara ayat Tuhan dan yang bukan. Itu semua dapat membuat ketidakharmonisan dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, setiap orang perlu memikirkan kembali praktik beragama yang selama ini dianutnya pada perubahan era disrupsi ini.

Keseimbangan antara agama dan bangsa justru menjadi modal untuk kepentingan umat. Moderasi dalam beragama menjadi muatan nilai praktik yang sesuai dipraktikkan agar terwujud kemaslahatan bersama.

Mental adil, moderat, dan berimbang menjadi kunci untuk mengelola pluralitas bangsa Indonesia. Setiap penduduk Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk mengembangkan kehidupan bersama yang tentram, damai bahagia. Bila hal ini dapat dilaksanakan maka setiap warga negara seharusnya dapat menjadi manusia Indonesia seutuhnya sekaligus menjadi manusia yang menjalankan agama seutuhnya.

Indonesia mempunyai sejarah kekerasan sosial keagamaan yang panjang, tentunya konflik tersebut berakibat pada kerugian yang banyak hingga tidak ternilai baik harta maupun jiwa. Banyak rumah peribadatan, pemukiman penduduk dan bahkan fasilitas sosial dihancurkan, hingga memakan korban jiwa yang masif. Kekerasan tersebut sangat mungkin terjadi dan banyak diberitakan melalui media, baik itu media cetak maupun media elektronik. Salah satu penyebabnya karena berita *hoax* berlandaskan agama yang disebarkan melalui media sosial. Oleh sebab itu, masyarakat dalam menggunakan media sosial harus lebih cermat dan cerdas.

Dalam indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang diterbitkan oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan (2019), toleransi merupakan salah satu indikator serta aspek paling penting untuk menciptakan kerukunan umat beragama, yaitu sebuah kumpulan umat beragama yang saling berinteraksi secara toleran dan harmonis serta saling menghargai dalam menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. (Faisal, 2020).

Implementasi dalam moderasi beragama sangat dibutuhkan pada era disrupsi digital saat ini. Upaya penting dalam menerapkan moderasi beragama saat ini adalah bertujuan agar mencetak generasi yang

moderat dan tidak gampang terpengaruh oleh paham-paham radikal yang disebarkan dari dunia maya. Implementasi dalam menanamkan moderasi beragama terhadap milenial di era disrupsi digital saat ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Dapat memanfaatkan media sosial di era digital ini dengan cara yang bijak dan dapat membedakan paham radikal dengan pemahaman moderasi beragama; 2) Pendidikan yang berbasis moderasi beragama diperlukan terhadap para pengajar di sekolah maupun di universitas untuk mencetak generasi yang toleran terhadap perbedaan; 3) Mengikutsertakan generasi milenial dalam kegiatan di masyarakat; 4) Fungsi keluarga sebagai madrasah pertama sangat signifikan agar nantinya paham keagamaan radikal tidak akan berkembang dari ranah keluarga; dan 5) Ruang dialog yang harus dibangun dengan generasi milenial, baik di dalam rumah maupun dalam ranah masyarakat.

Narasi dan kajian keagamaan serta paham-pahamnya merupakan arena pertarungan yang sengit dan memiliki potensi besar diproduksi kembali oleh kelompok tertentu guna menyebarkan ide, gagasan, aliran serta simbol keagamaan kepada khalayak publik. Hal inilah yang mengharuskan perlunya cara beragama yang inklusif dan toleran untuk bisa merebut panggung ruang digital dengan menguatkan moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat.

toleran terhadap semua agama. Tentu saja, petunjuk seorang Muslim dalam hal ini adalah perkataannya dalam QS. Al-Kaafirun: 6, Allah Ta'ala berfirman "Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku". Ayat ini sudah sangat jelas, toleransi beragama dalam Islam adalah membiarkan umat lain untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka

B. Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan sesuatu bahagian dari sebuah budaya yang ada didalam suatu masyarakat yang tidak dapat dijauhkan dari masyarakat itu sendiri, kearifan lokal tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah nilai-nilai yang ada kearifan lokal di Indonesia sudah terbukti ikut menentukan atau berperan dalam suatu kemajuan masyarakatnya. Menurut Sibarani (dalam Daniah) *Local Wisdom* adalah suatu bentuk pemahaman yang ada dalam m untuk mengatur kehidupan masyarakat atau yang biasa disebut dengan kearifan lokal (*local wisdom*)

Local wisdom merupakan satu perangkat pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan strategi kehidupan yang berwujud dalam aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal, yang mampu menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka (Fajarini, 2014; Saputra, 2011; Cheng, 2002; Triyanto, 2017). Kearifan lokal menjadi pengetahuan dasar dari kehidupan, didapatkan dari pengalaman ataupun kebenaran hidup, bisa bersifat abstrak atau konkret, diseimbangkan dengan alam serta kultur milik sebuah kelompok masyarakat tertentu (Mungmachon, 2012: 174). Kearifan

lokal juga dapat ditemukan, baik dalam kelompok masyarakat maupun pada individu.

Hal senada juga diungkapkan oleh Alfian (2013: 428) Kearifan lokal diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta sebagai strategi kehidupan yang berwujud aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhan mereka. Berdasarkan pendapat Alfian itu dapat diartikan bahwa kearifan lokal merupakan adat dan kebiasaan yang telah mentradisi dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara turun temurun yang hingga saat ini masih dipertahankan keberadaannya oleh masyarakat hukum adat tertentu di daerah tertentu. Berdasarkan pengertian di atas dapat diartikan bahwa *local wisdom* (kearifan lokal) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat *local* yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal digunakan oleh masyarakat sebagai pengontrol kehidupan sehari-hari dalam hubungan keluarga, dengan sesama saudara, serta dengan orang-orang dalam lingkungan yang lebih luas (Kamonthip & Kongprasertamorn, 2007: 2). Oleh karena cakupannya adalah pengetahuan, budaya, dan kecerdasan pengetahuan lokal, maka kearifan lokal dikenal juga dengan istilah *local knowledge*, *local wisdom*, atau *genious local*.

Adapun karakteristik kearifan lokal, yaitu (1) harus menggabungkan pengetahuan kebajikan yang mengajarkan orang tentang etika dan nilai-nilai moral; (2) kearifan lokal harus mengajar orang untuk mencintai alam, bukan untuk menghancurkannya; dan (3) kearifan lokal harus berasal dari anggota komunitas yang lebih tua

lokal juga dapat ditemukan, baik dalam kelompok masyarakat maupun pada individu.

Hal senada juga diungkapkan oleh Alfian (2013: 428) Kearifan lokal diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta sebagai strategi kehidupan yang berwujud aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhan mereka. Berdasarkan pendapat Alfian itu dapat diartikan bahwa kearifan lokal merupakan adat dan kebiasaan yang telah mentradisi dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara turun temurun yang hingga saat ini masih dipertahankan keberadaannya oleh masyarakat hukum adat tertentu di daerah tertentu. Berdasarkan pengertian di atas dapat diartikan bahwa *local wisdom* (kearifan lokal) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat *local* yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal digunakan oleh masyarakat sebagai pengontrol kehidupan sehari-hari dalam hubungan keluarga, dengan sesama saudara, serta dengan orang-orang dalam lingkungan yang lebih luas (Kamonthip & Kongprasertamorn, 2007: 2). Oleh karena cakupannya adalah pengetahuan, budaya, dan kecerdasan pengetahuan lokal, maka kearifan lokal dikenal juga dengan istilah *local knowledge*, *local wisdom*, atau *genious local*.

Adapun karakteristik kearifan lokal, yaitu (1) harus menggabungkan pengetahuan kebajikan yang mengajarkan orang tentang etika dan nilai-nilai moral; (2) kearifan lokal harus mengajar orang untuk mencintai alam, bukan untuk menghancurkannya; dan (3) kearifan lokal harus berasal dari anggota komunitas yang lebih tua

(Mungmachon, 2012:174). Kearifan lokal dapat berbentuk nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum, adat, aturan-aturan khusus. Selanjutnya, nilai-nilai yang relevan dengan kearifan lokal, antara lain nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kreatif, serta kerja keras (Haryanto, 2014: 212). Dalam karya seni, khususnya seni tradisional, kearifan lokal akan tercermin dalam bahasa, baik secara lisan maupun tulisan: pepatah, pantun, nyanyian, atau petuah. Berdasarkan sejarahnya, seni pertunjukan tradisional berawal dari upacara dan ritual keagamaan tradisional yang bersifat magis, disampaikan dalam bentuk mantra-mantra secara berulang (Sastrowardoyo, 1995; Hasanuddin, 1996). Di Indonesia, upacara dan ritual keagamaan tersebut menjadi cikal bakal seni pertunjukan teater tradisional dengan adanya perpaduan unsur gerak dan musik. Pertunjukan tersebut diyakini sebagai bentuk keyakinan batin pada alam dan pencipta, sekaligus sebagai bentuk eksistensi berkesenian (Kayam, 1981; Ninuk, 2000). Awal menjadi seni pertunjukan teater tradisional, dimulai sebagai teater tanpa naskah dan kuat unsur-unsur kedaerahannya (Samidi, 2006: 237). Dalam perkembangannya, eksistensi teater tradisional, seperti Makyong (Kepulauan Riau), Mendu (Kalimantan), Topeng Betawi (Betawi), Ketoprak Mataram (Jawa Tengah) serta Randai (Sumatera Barat) dijadikan sebagai hiburan pelipur lara (Hasanuddin, 1996: 27-29). Seni pertunjukan tradisional merupakan bagian dari budaya lokal yang memuat beragam unsur kearifan budaya lokal. Di dalamnya terhimpun ilmu pengetahuan, baik nilai-nilai ajaran moral, religi, pendidikan, maupun unsur-unsur yang bersifat kebendaan sebagai sebuah warisan kebudayaan. Dengan adanya muatan beragam nilai

tersebut, seni pertunjukan tradisional berfungsi sebagai penuntun dan pembawa pesan moral untuk masyarakat pemiliknya. (Iswadi Bahardur, 2018: 146) Kearifan lokal pertama kali diperkenalkan oleh Quaritch Wales (1948/1949) dalam Widyanti, Triani: 161. Ini adalah kemampuan suatu budaya tertentu untuk menjaga pengaruh budaya asing ketika mereka saling berhubungan (Rosidi, 2010: 1). Pendapat lain dikemukakan oleh Ahimsa Putra (hal.5) yang mendefinisikan bahwa kearifan lokal mengacu pada perangkat pengetahuan dan praktik-praktik komunitas tertentu yang diambil dari generasi sebelumnya dan pengalaman terkait dengan komunitas lain untuk menyelesaikan masalah apa pun.

Kearifan lokal dilihat dari kamus Inggris Indonesia, terdiri dari 2 kata yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Lokal berarti setempat dan *wisdom* sama dengan kebijaksanaan. Dengan kata lain maka kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan pandangan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota-anggota masyarakatnya (Nadlir, 2014: 305-330)

Menurut Ridwan (2010: 2) kearifan lokal dapat dipahami sebagai upaya manusia dalam menerapkan kognisi untuk melakukan sesuatu dan memikirkan objek tertentu, atau peristiwa yang terjadi di tempat tertentu. Seperti yang juga peneliti kutip dari penjelasan TWN (Tim Wacana Nusantara, 2009: 1)) yang menjelaskan bahwa *local wisdom* merupakan suatu tradisi atau adat kebiasaan yang dilakukan suatu kelompok orang yang dia tinggal dan menetap di daerah tertentu, yang dapat dijadikan sebagai hukum dalam suatu

komunitas tertentu yang sangat beragam. *Local wisdom* dalam suatu komunitas masyarakat juga bisa kita temukan dalam bentuk nyanyian, kata-kata mereka yang bijak, saran-saran, gambargambar, tata bahasa yang mereka gunakan, dan juga naskah-naskah kuna yang dikumpulkan dalam aktivitas mereka sehari-hari masyarakat tersebut. (Ridwan 2010: 3)

Orang Bugis tetap memiliki rasa kepribadian yang kuat, prestise dan hasrat berkompetisi untuk mencapai kedudukan sosial tinggi, baik melalui jabatan maupun kekayaan. Hal itu merupakan faktor pendorong utama yang menggerakkan roda kehidupan sosial kemasyarakatan. Orang Bugis mendokumentasikan kearifan lokal mereka dalam karya sastra mereka (Tim Wacana Nusantara, 2009: 1). Menurut Marsono (2007: 182)

Dari penjelasan Marsono peneliti dapat menemukan bahwa local wisdom pada setiap anggota kelompok etnisnya Indonesia pada waktu dimana bangsa Indonesia tidak dapat menuliskan, dan juga tidak bisa menempatkan local wisdom mereka kedalam suatu bentuk acara ritualnya yang melegenda yang mana bersifat tradisional, baik itu berupa cerita rakyat, cerita tulisan dan lisan dan kelegaannya.

Mereka lalu menuliskan yang berkaitan dengan kebudayaan mereka , *local wisdom* adalah suatu bentuk dari kebudayaan yang hanya terletak pada alam fikiran manusia saja (abstrak) Local wisdom juga bisa dijadikan sebagai lambang, dalam artian lambang yang baik, yang dapat berarti "baik", "positif", "tidak baik" "negatif". Local wisdom yang ada di Indonesia, harus mempunyai kejelasan maksud dan tujuannya kearah yang positif atau baik 'kearifan' harus

selalu memiliki nilai-nilai kebaikan dan juga positif'. Ahimsa- Putra menyatakan bahwa kebijaksanaan tersirat dalam bahasa dan sastra (lisan dan tulisan) suatu masyarakat. (D. B. Putut Sutiyadi, 2013: 294)

Kearifan lokal mencakup berbagai pengetahuan, sudut pandang, nilai, dan praktik suatu komunitas, baik yang diwarisi dari generasi sebelumnya dan didapat dari praktik saat ini. Juga dinyatakan bahwa mempelajari literatur dapat membantu kita memahami pola berpikir suatu masyarakat atau peristiwa berbeda yang terjadi dalam masyarakat itu. Dengan demikian, dengan menganalisis bahasa dan sastra, seseorang dapat mengungkapkan berbagai kearifan lokal suatu masyarakat (D. B. Putut Sutiyadi, 2013: 294)

Menurut Musafiri dkk (2016), yang peneliti kutip local wisdom merupakan bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mengurangi efek dari era globalisasi, dengan cara menanamkan nilai-nilai yang positif pada anak-anak remaja sekarang ini. Nilai-nilai yang ditanamkan itu pada anak-anak remaja harus berdasarkan kepada nilai-nilai atau aturan-aturan norma, dan juga adat istiadat yang masih berlaku dalam kehidupan masyarakat itu. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut.

Menurut Paulo freire (1970), Pendidikan berbasis kearifan lokal adalah pendidikan yang mengajarkan peserta didik untuk selalu konkret dengan apa yang mereka hadapi. Kearifan lokal adalah

gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya (Sartini, 2004).

Seperti yang peneliti kutip, Sunaryo et al (2003) mengatakan, *local wisdom* dapat berupa suatu pemahaman lokal yang mana telah menyatu dengan sistem keyakinan, nilai-nilai norma, dan juga dengan kebudayaan, yang ditampakkan dalam adat kebiasaan yang mana sudah dianutnya dalam waktu yang juga lama. Seperti yang juga peneliti kutip bahwa *local wisdom*, meliputi semua macam bentuk pemahaman, kepercayaan, wawasannya, serta adat kebiasaan yang sering dilakukan dan juga perilakunya dalam bergaul dengan masyarakat lainnya yang hidup dalam suatu komunitas (Keraf: 2002).

Seperti yang peneliti kutip juga dari pendapat Tjahjono, yang peneliti jelaskan dalam bahasa peneliti sendiri *local wisdom* (kearifan lokal), yaitu sesuatu yang berhubungan dengan sistem norma dan nilai-nilai yang diatur, digunakan, dipahami, dipakai, oleh komunitas masyarakat daerah atau lokal, yang di dasarkan pada pengetahuan dan juga pengalaman pribadi yang mereka miliki dalam berkomunikasi dengan lingkungan dimana mereka berada. (Tjahjono: 2000)

Local Wisdom memiliki beberapa ciri-ciri diantaranya:

1. Mampu mengendalikan diri
2. Tempat untuk melindungi dari pengaruh kebudayaan yang berasal luar daerah.

Kearifan lokal merupakan fenomena yang luas dan komprehensif. Ruang lingkup kearifan lokal sangat banyak dan beragam sehingga tidak dibatasi oleh ruang. Kearifan lokal lebih menekankan pada tempat dan lokalitas dari kearifan tersebut sehingga tidak harus suatu kearifan yang belum muncul dalam suatu komunitas sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan, alam dan interaksinya dengan masyarakat dan budaya lainnya.

Contoh kearifan lokal, diantaranya: bahasa daerah, tarian daerah, dan musik daerah.

Local wisdom ialah jati diri atau kepribadian kebudayaan dari yang membuat suatu bangsa itu bisa menyerap, dan juga mampu untuk mengolah budaya yang berasal dari luar suatu bangsa, yang menjadi watak dan juga kemampuannya sendiri (Wibowo, 2015:17) Jati diri dan pribadi itu tentunya bisa menyesuaikan dengan suatu pandangan hidup dalam masyarakat, supaya tidak terjadinya pergeseran dengan nilai. *local wisdom* ialah suatu bentuk sarana yang mampu mengolah budaya serta bisa melindungi budaya dari budaya asing yang tidak baik. Kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia tidak sepenuhnya baik, perlu adanya penyaringan oleh masyarakat melalui kearifan lokal yang terbentuk di masyarakat.

Kearifan lokal menurut (Ratna,2011:94) adalah semen pengikat dalam bentuk kebudayaan yang sudah ada sehingga didasari keberadaan. Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu budaya yang diciptakan oleh aktor-aktor lokal melalui proses yang berulang-ulang, melalui internalisasi dan interpretasi ajaran agama dan budaya yang disosialisasikan dalam bentuk norma-norma dan dijadikan pedoman

dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. Selain itu kearifan lokal juga diciptakan dari seni-seni tradisional yang berkembang secara turun menurun dikalangan masyarakat. Kesenian tradisional mengajarkan hal-hal yang baik dan dapat dijadikan pedoman dalam bermasyarakat.

2. Bentuk-bentuk Kearifan Lokal

Bentuk-bentuk kearifan lokal menurut Haryanto (2014:212) ialah kedamaian dalam menjalankan agama dalam bentuk kegiatan sosial yang didasari pada suatu kearifan lokal budaya. Budaya dalam hal ini yaitu nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturanaturan khusus merupakan bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat. Nilai tertinggi yang berhubungan dengan local wisdom misalnya adanya rasa cinta kepada pencipta alam semesta beserta yang ada didalamnya dan juga bertanggungjawab, selalu jujur, selalu disiplin, dan juga mempunyai rasa hormat menghormati, mempunyai rasa sayang dan juga peduli, dan tidak mudah menyerah, berkeadilan, dan juga mempunyai toleransi dan juga rasa persatuan. Seperti yang peneliti kutip pendapat Judistira (2008: 141) *Local wisdom* ialah suatu bentuk skema dari sebuah kebudayaan dengan berdasarkan pada baik dan buruknya dan juga budaya lokal ialah suatu yang memberikan kelengkapan budaya regional, yang mana bagian yang paling hakiki dari suatu kebudayaan nasional. Budaya lokal tidak hanya terungkap dalam suatu bentuk pernyataan rasa saja yang indah melalui seni, tetapi juga segala macam bentuk, perilaku, tindakan, serta bentuk-bentuk pemikiran yang juga ada jauh dibelakang apa yang nampak itu.

Yunus (2014: 37) kearifan lokal merupakan budaya yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dan di tempattempat tertentu yang dianggap mampu bertahan dalam menghadapi arus globalisasi, karena kearifan lokal tersebut mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai sarana pembangunan karakter bangsa. Selain itu menurut Yunus (2014; 95) *Local wisdom* apabila mau untuk tetap bertahan lebih lama lagi harus bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman, tapi tidak hanya cukup hanya dengan mengikuti perubahan zaman saja, yang mana harus mempunyai tujuan dalam masyarakat, Hal itu karena local wisdom harus bisa bersatu dengan semua masyarakat dan menjadi panutan dalam masyarakat, dan yang paling penting sekali local wisdom harus selalu diperhatikan jati diri serta nilai-nilai yang ada di dalam local wisdom itu sendiri. Kearifan lokal menurut Rosidi (2011: 29) adalah kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan pada saat ini, zaman yang penuh dengan informasi dan berkomunikasi apabila tidak kita tanggap dengan sebaiknya, maka dapat mengakibatkan kehilangan *local wisdom* sebagai jati diri suatu bangsa Seperti yang juga peneliti kutip pendapat Wahyudi (2014:14) menyatakan bahwa, local wisdom ialah suatu bentuk aturanaturan yang berupa lisan yang dijadikan sebagai panutan dalam kehidupan masyarakat, yang mana mencakup semua aspek-aspek kehidupan, misalnya aturan-aturan yang berkaitan hubungan-hubungan diantara sesama masyarakat. Contohnya adalah hubungan sosial yang baik diantara perorangan ataupun kelompok-kelompok di dalam suatu pemerintahan, adat istiadat, aturan-aturan perkawinan dalam kehidupan sehari-hari dalam suatu masyarakat

Aspek kehidupan meliputi spiritual, kecerdasan, emosional manusia, fisik (tubuh manusia), dan sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Tanpa adanya interaksi sosial maka tidak akan mungkin ada kehidupan bersama.

Aturan yang menyangkut hubungan manusia dengan alam, makhluk hidup (binatang dan tumbuhan) dengan tujuan untuk perlindungan terhadap alam sedangkan bentuk aturan-aturan yang mempunyai hubungan-hubungan dengan manusia yang mana mempunyai sifat yang gaib, contohnya sang pencipta (Tuhan) dan juga roh yang dianggap gaib, *local wisdom* bisa berbentuk adat kebiasaan.

Menurut Haryanto (2013: 368) *Local wisdom* seperti yang dikatakan yang berupa kata-kata yang bijak hanya nasehat yang berbentuk cerita lisan, aturan-aturan, prinsip-prinsip, norma-norma, dan juga aturan-aturan sosial, yang mana menjadi sistem sosial. Upacara-upacara kebiasaan dan juga ritual-ritual yang biasa tampak di dalam kepribadian sehari-hari yang dilakukan dalam kehidupan sosial. Cerita-cerita masyarakat yang mengandung amanat pada masyarakat dan generasi muda pada khususnya agar dapat menjaga nilai-nilai kearifan lokal. Begitupun dengan ketoprak mataram, seni pagelaran yang memberikan gambaran tentang kehidupan pada jaman kerajaan mataram. Cerita yang diangkat dalam ketoprak mataram mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang mencerminkan budaya Jawa.

Menurut Ratna (2011-95) *Local wisdom*, ialah bahasa yang digunakan berbentuk lisan maupun tertulis. *Local wisdom* dalam masyarakat

yang dapat dilihat dari beberapa cerita-cerita rakyat, lagulagu, petuah dan juga pepatah, dan kitab kuno yang melekat pada kepribadian dalam kehidupan sehari-harinya. Selain itu juga dalam bentuk seni pertunjukan seperti tari, gamelan, dan ketoprak mataram. Kearifan lokal ini akan mewujudkan menjadi budaya tradisi, kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu.

Selain berupa nilai dan kebiasaan kearifan lokal juga bisa berbentuk benda yang tampak nyata misalnya ketoprak mataram. Ketoprak mataram diakui sebagai budaya nasional, yang mana mempunyai nilai-nilai estetis yang bisa menciptakan kearifan dalam masyarakat Jawa, dan juga kesenian ketoprak mataram ialah cerminan dalam suatu kehidupan masyarakat Jawa

Dari beberapa uraian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa kearifan lokal adalah satu perangkat pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan strategi kehidupan yang herwujud dalam aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal, yang mampu menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka, dan juga sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota-anggota masyarakatnya.

C. Komunikasi Lintas Budaya

Komunikasi Lintas Budaya adalah proses pertukaran pesan, pikiran, gagasan, serta makna antara dua orang atau lebih yang berbeda latar belakang budaya, baik itu antar suku, budaya, bangsa. (Liliweri, 2003:9) Komunikasi lintas budaya menurut oleh Williams (1966) dalam Samovar dan Potter (1976), berkisar pada perbandingan perilaku komunikasi antarbudaya dengan menunjukkan persamaan dan perbedaan: (1) persepsi, yaitu sifat dasar persepsi dan pengalaman persepsi, peran lingkungan sosial dan fisik terhadap pembentukan persepsi; (2) kognisi, yang terdiri unsur-unsur khusus kebudayaan, proses berfikir, bahasa dan cara berfikir; (3) sosialisasi, berhubungan dengan masalah sosialisasi universal dan relativitas, tujuan institusional; dan (4) kepribadian, misalnya tipe-tipe budaya pribadi yang mempengaruhi etos, dan tipologi karakter atau watak bangsa. Komunikasi lintas budaya adalah proses di mana dialihkan ide atau gagasan suatu budaya yang satu kepada budaya yang lainnya dan sebaliknya, dan hal ini bisa antar dua kebudayaan yang terkait ataupun lebih, tujuannya untuk saling memengaruhi satu sama lainnya, baik itu untuk sebuah kebaikan kebudayaan maupun untuk menghancurkan suatu kebudayaan, atau bisa jadi tahap awal dari proses akulturasi (penggabungan dua kebudayaan atau lebih yang menghasilkan kebudayaan baru. (Wikipedia).

Berdasarkan beberapa pengertian para ahli dan pakar bidang komunikasi, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi lintas budaya merupakan proses di mana orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda saling berinteraksi. Selain bahasa, komunikasi lintas budaya berfokus pada atribut sosial, pola pikir, dan budaya dari kelompok-kelompok yang berbeda dari orang-orang. Hal ini juga melibatkan pemahaman budaya yang berbeda, bahasa, dan adat istiadat orang-orang dari negara-negara lain. Komunikasi lintas budaya berperan dalam ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, studi budaya, linguistik, psikologi dan ilmu komunikasi. Berikut beberapa teori komunikasi Lintas Budaya:

1. *Face Negotiation Theory*

Teori ini merupakan teori terkait norma dan aturan budaya dapat mempengaruhi anggota budaya tertentu mengelola citra (*image*) dan bagaimana mengelola situasi konflik. Contoh dalam budaya kolektivisme pengelolaan konflik cenderung memerlukan waktu lama, mementingkan perasaan atau hubungan relasional dibandingkan substansi konflik itu sendiri supaya pihak-pihak yang berkonflik tidak kehilangan muka, dan bukan efisiensi yang dipentingkan. (Agung & Kusumastuti, 2007)

2. *Conversational Constraints Theory*

Teori ini merupakan teori yang menyatakan bahwa hambatan pembicaraan baik budaya atau pribadi mempengaruhi bagaimana suatu pesan dikonstruksi dan gaya pembicaraan seseorang untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu. Contoh dalam anggota budaya kolektivisme dan orang yang memandang dirinya saling

tergantung (*interdependent self construal*) lebih mementingkan pembicaraan-pembicaraan yang berorientasi pada hubungan atau relasional dan perasaan orang lain

3. *Expectancy Violations Theory*.

(cara berkomunikasi interpersonal dipengaruhi oleh norma sosial atau budaya yang bisa menjadi acuan prediksi/dugaan. Pelanggaran terhadap norma akan menimbulkan kemarahan atau kehati-hatian kepada orang tertentu, penilaian terhadap pelanggaran tergantung kepada kedekatan, hubungan dan konteks)

4. *Anxiety/Uncertainty Management Theory*

(Komunikasi akan efektif apabila para komunikator sangat seksama (*mindful*) dalam mengelola ketidakpastian dan kecemasan)

5. *Communication Accomodation Theory*

(strategi seseorang dalam mengakomodasi tergantung kepada budaya, komunikasi menunjukkan sikapnya melalui strategi mendekat (*converge*) atau menjauh (*diverge*). Contoh dalam budaya kolektivisme menggunakan gaya bahasa (menekankan peranan) karena untuk kesopanan dan bahasa formal dengan anggota luar.

6. Adaptasi lintas budaya

Teori ini menjelaskan bagaimana komunikator beradaptasi satu sama lain di pertemuan terkait tujuan, di mana faktor-faktor budaya perlu dimasukkan. (Ellingsworth, 1983). Menurut teori adaptasi lintas budaya, kompetensi komunikatif adalah ukuran dari adaptasi yang disamakan dengan asimilasi. Menurut Gudykunst dan Kim

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan terkait Penguatan Komunikasi Lintas Budaya Melalui Diklat Penyuluh Agama Berbasis Nilai Kearifan lokal dalam membangun Moderasi Beragama di Sumatera Utara. Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan suatu masalah. Penelitian deskriptif dilakukan bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena dalam situasi tertentu, dalam penelitian akan menggambarkan keadaan dan situasi masyarakat dalam hal memahami moderasi beragama di Sumatera Utara.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. (Moleong: 2005: 4). Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan tiga alasan yaitu: pertama, lebih mudah mengadakan penyesuaian dengan kenyataan yang berdimensi ganda. Kedua, lebih mudah menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan subjek penelitian. Ketiga, memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola

nilai yang dihadapi.(Margono: 2006. 41) Sedangkan pendekatan deskriptif digunakan, karena penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, tetapi hanya menggambarkan suatu gejala atau keadaan yang diteliti secara apa adanya serta diarahkan untuk memaparkan fakta-fakta, kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat.

Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif digunakan dimaksudkan untuk mendeskripsikan bagaimana pemahaman masyarakat masyarakat dalam hal memahami moderasi beragama di Sumatera Utara.

D. Tehnik Penetapan Sumber

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan data skunder:

1. **Data primer** yaitu data terpenting dalam penelitian yang akan diteliti. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui pengamatan, maupun melalui pertanyaan yang telah disiapkan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dan jawaban dari daftar pertanyaan yang akan diajukan. Informan dalam penelitian ini di tentukan berdasarkan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Informan dianggap tahu tentang masalah yang akan diteliti, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek yang diteliti.(Moleong; 2005, 223)
2. **Data skunder** yaitu data yang mendukung data primer, mencakup data lokasi penelitian dan data lain baik dari dokumen-

nilai yang dihadapi.(Margono: 2006. 41) Sedangkan pendekatan deskriptif digunakan, karena penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, tetapi hanya menggambarkan suatu gejala atau keadaan yang diteliti secara apa adanya serta diarahkan untuk memaparkan fakta-fakta, kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat.

Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif digunakan dimaksudkan untuk mendeskripsikan bagaimana pemahaman masyarakat masyarakat dalam hal memahami moderasi beragama di Sumatera Utara.

D. Tehnik Penetapan Sumber

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan data skunder:

1. **Data primer** yaitu data terpenting dalam penelitian yang akan diteliti. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui pengamatan, maupun melalui pertanyaan yang telah disiapkan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dan jawaban dari daftar pertanyaan yang akan diajukan. Informan dalam penelitian ini di tentukan berdasarkan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Informan dianggap tahu tentang masalah yang akan diteliti, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek yang diteliti.(Moleong; 2005, 223)
2. **Data skunder** yaitu data yang mendukung data primer, mencakup data lokasi penelitian dan data lain baik dari dokumen-

dokumen, buku, dan hasil-hasil penelitian yang mendukung masalah penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini terutama dari buku Saku Moderasi Beragama Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tanya Jawab Moderasi Beragama / oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. - Cet. Pertama. - Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019. Iv. Beberapa buku Moderasi beragama yang telah di terbitkan baik oleh Badan Litbang dan Diklat kementerian Agama maupun buku penulis lainnya.

TABEL 1
Informan Penelitian

No.	Nama	Keterangan
1.	Drs. Muhammad Halomoan, M. Pd	Kasi Balai Diklat Keagamaan Medan
2.	Suhesti wira Dharma, M. A	Kasubbag TU BDK Medan
3.	Dra. ELLIS URMAWATI SIHOMBING	Penyuluh Agama Madya Kristen
4.	DARNI WAHYUNI, S.HI., M.A	Penyuluh Agama Madya Islam
5.	SUDARIYADI, S.Ag	Penyuluh Agama Muda Islam
6.	AGUS SALIM S.Ag	Penyuluh Agama Muda Islam
7.	Drs. Nur Asyiah	Kasi Adm BDK Medan

8.	ISWADI	Penyuluh Agama Islam Non Pns
9.	Nizar Hasan	Kasi Administrasi BDK Medan
10..		Widyaiswara BDK medan

E. Tehnik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang berpijak dari data yang di dapat dari hasil wawancara, serta dari hasil dokumentasi. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian seperti dokumen dokumen resmi, dan sebagainya. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berusaha menggambarkan data secara sistematis, ringkas dan sederhana sehingga lebih mudah dipahami oleh peneliti lain yang tertarik dengan hasil penelitian ini.(Milles; 2007)

Proses analisis data yang dilakukan peneliti dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data adalah merupakan analisis data yang menggolongkan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik kesimpulan (*verifikasi*). Data yang diperoleh dari lapangan langsung ditulis dengan rinci dan sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Laporan-laporan itu perlu direduksi, yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian

agar mudah untuk menyimpulkannya. Reduksi data dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan serta membantu dalam memberikan kode kepada aspek-aspek tertentu.

2. Penyajian Data (*data display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data yaitu mengumpulkan data atau informasi secara tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang sudah ada disusun dengan menggunakan teks yang bersifat naratif, selain itu bisa juga bersifat matriks, grafik, dan *chart*.

Penyajian data dilakukan dengan alasan supaya peneliti dapat menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan. Selain itu juga supaya peneliti mudah dalam memahami yang telah terjadi dan dapat merencanakan apa yang akan dilakukan selanjutnya.

3. Verifikasi (*verification*)

Verifikasi merupakan rangkaian analisis data puncak. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif membutuhkan verifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi dimaksudkan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid. Oleh karena itu, ada baiknya sebuah kesimpulan ditinjau ulang dengan cara memverifikasi kembali catatan-catatan selama penelitian dan mencari pola, tema, model, hubungan dan persamaan untuk diambil sebuah kesimpulan. Hal ini akan disajikan dalam gambar berikut:

BAB IV HAMIL PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Provinsi Sumatera Utara

a. Sejarah

Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatra Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama *Gouvernement van Sumatra* dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatra, dipimpin oleh seorang Gubernur yang berkedudukan di Kota Medan. Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatra kemudian dibagi menjadi tiga sub provinsi yaitu: Sumatra Utara, Sumatra Tengah, dan Sumatra Selatan. Provinsi Sumatra Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan yaitu: Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatra Timur, dan Keresidenan Tapanuli.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia (R.I) No. 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatra dibagi menjadi tiga provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu: Provinsi Sumatra Utara, Provinsi Sumatra Tengah, dan Provinsi Sumatra Selatan. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatra Utara.

Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatra. Dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I. Nomor 22/Pem/PIDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatra

Utara ditiadakan. Selanjutnya dengan Ketetapan Pemerintah Darurat R.I. pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatra Timur. Kemudian, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatra Utara. Dengan Undang-Undang R.I. No. 24 Tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatra Utara sebagian menjadi wilayah Provinsi Aceh.

b. Geografi

Provinsi Sumatra Utara terletak pada 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur, Luas daratan Provinsi Sumatra Utara 72.981,23 km². Sumatera Utara pada dasarnya dapat dibagi atas:

- Pesisir Timur
- Pegunungan Bukit Barisan
- Pesisir Barat
- Kepulauan Nias

Pesisir timur merupakan wilayah di dalam provinsi yang paling pesat perkembangannya karena persyaratan infrastruktur yang relatif lebih lengkap daripada wilayah lainnya. Wilayah pesisir timur juga merupakan wilayah yang relatif padat konsentrasi penduduknya dibandingkan wilayah lainnya. Pada masa kolonial Hindia Belanda, wilayah ini termasuk *residentie Sumatra's Oostkust* bersama provinsi Riau. Di wilayah tengah provinsi berjajar Pegunungan Bukit Barisan,

Di pegunungan ini terdapat beberapa wilayah yang menjadi kantong-kantong konsentrasi penduduk. Daerah di sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir, merupakan daerah padat penduduk yang menggantungkan hidupnya kepada danau ini. Pesisir barat merupakan wilayah yang cukup sempit, dengan komposisi penduduk yang terdiri dari masyarakat Batak, Minangkabau, dan Aceh. Namun secara kultur dan etnolinguistik, wilayah ini masuk ke dalam budaya dan Bahasa Minangkabau

c. Batas Wilayah Dan Iklim

Adapun batas wilayah provinsi Sumatra Utara ialah;

Utara Provinsi Aceh dan Selat Malaka

Timur Selat Malaka

Selatan Provinsi Riau, Provinsi Sumatra Barat, dan Samudera Indonesia

Barat Provinsi Aceh dan Samudera Indonesia

Terdapat 419 pulau di propisi Sumatra Utara. Pulau-pulau terluar adalah pulau Simuk (kepulauan Nias), dan pulau Berhala di selat Sumatra (Malaka). Kepulauan Nias terdiri dari pulau Nias sebagai pulau utama dan pulau-pulau kecil lain di sekitarnya. Kepulauan Nias terletak di lepas pantai pesisir barat di Samudra Hindia. Pusat pemerintahan terletak di Gunung Sitoli.

Kepulauan Batu terdiri dari 51 pulau dengan 4 pulau besar: Sibua, Pini, Tanahbala, Tanahmasa. Pusat pemerintahan di Pulautele di pulau

Sibuasi. Kepulauan Batu terletak di tenggara kepulauan Nias. Pulau-pulau lain di Sumatra Utara: Imanna, Pasu, Bawa, Hamutaia, Batumakalele, Lego, Masa, Bau, Simaleh, Makole, Jake, dan Sigata, Wunga.

Di Sumatra Utara saat ini terdapat dua taman nasional, yakni Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Batang Gadis. Menurut Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor 44 Tahun 2005, luas hutan di Sumatra Utara saat ini 3.742.120 hektare (ha). Yang terdiri dari Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam seluas 477.070 ha, Hutan Lindung 1.297.330 ha, Hutan Produksi Terbatas 879.270 ha, Hutan Produksi Tetap 1.035.690 ha dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 52.760 ha.

Namun angka ini sifatnya secara *de jure* saja. Sebab secara *de facto*, hutan yang ada tidak seluas itu lagi. Terjadi banyak kerusakan akibat perambahan dan pembalakan liar. Sejauh ini, sudah 206.000 ha lebih hutan di Sumut telah mengalami perubahan fungsi. Telah berubah menjadi lahan perkebunan, transmigrasi. Dari luas tersebut, sebanyak 163.000 ha untuk areal perkebunan dan 42.900 ha untuk areal transmigrasi. Daerah ini beriklim tropis. Pada bulan Mei hingga September, curah hujan ringan. Sedangkan Oktober hingga April, curah hujan relatif lebat akibat intensitas udara yang lembap.

d. Demografi

Sumatra Utara merupakan provinsi keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa

Tengah. Menurut hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk (SP) 1990, penduduk Sumatra Utara berjumlah 10,81 juta jiwa, dan pada tahun 2010 jumlah penduduk Sumatra Utara telah meningkat menjadi 12,98 juta jiwa. Kepadatan penduduk Sumatra Utara pada tahun 1990 adalah 143 jiwa per km² dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 178 jiwa per km². Dengan Laju Pertumbuhan Penduduk dari tahun 2000-2010 sebesar 1,10 persen. Sensus penduduk tahun 2020, penduduk Sumatra Utara bertambah menjadi 13.937.797 jiwa, dengan kepadatan penduduk 191 jiwa/km², dan per 30 Juni 2022 berjumlah 15.305.230 jiwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatra Utara setiap tahunnya tidak tetap. Pada tahun 2000 TPAK di daerah ini sebesar 57,34 persen, tahun 2001 naik menjadi 57,70 persen, tahun 2002 naik lagi menjadi 69,45 persen.

e. Suku bangsa

Sumatra Utara merupakan provinsi multi-etnis dengan Batak, Nias, Siladang,^[14] Melayu sebagai penduduk asli wilayah ini. Daerah pesisir timur Sumatra Utara, pada umumnya dihuni oleh orang-orang Melayu. Pantai barat dari Barus hingga Natal, banyak bermukim orang Minangkabau. Wilayah tengah sekitar Danau Toba, banyak dihuni oleh Suku Batak yang sebagian besarnya beragama Kristen. Suku Nias berada di kepulauan sebelah barat. Sejak dibukanya perkebunan tembakau di Sumatra Timur, pemerintah kolonial Hindia Belanda banyak mendatangkan kuli kontrak yang dipekerjakan di perkebunan. Pendetang tersebut kebanyakan berasal dari etnis Jawa dan Tionghoa. Di pesisir pantai timur seperti Langkat dan Deli Serdang terdapat etnis

Banjar yang sudah ada sejak abad ke-19. Ada juga etnis India (terutama Tamil) dan Arab yang beradu nasib di Sumatra Utara.

Berdasarkan Sensus Penduduk Indonesia 2010 dari 12.930.319 jiwa penduduk yang tercatat, mayoritas penduduk Sumatra Utara adalah orang Batak yakni 44,75%, sudah termasuk semua sub suku Batak, yakni Batak Toba, Karo, Angkola, Simalungun, Mandailing, dan Pakpak. Kemudian Jawa, Nias, Melayu, Tionghoa, Minang, Aceh, Banjar, India, dan lain-lain.

Berikut ini komposisi etnis atau suku bangsa di provinsi Sumatra Utara:

No	Suku	Jumlah 2020	%
	Batak	5.785.716	44,75%
	Jawa	4.309.719	32,41%
	Nias	911.820	7,05%
	Melayu	771.668	5,97%
	Tionghoa	420.320	3,63%
	Minangkabau	333.241	2,58%
	Aceh	133.439	1,03%
	Banjar	125.707	0,77%
	India	66.640	0,56%
	Sunda	35.500	0,27%
	Warga Negara Asing	29.676	0,23%
	Papua	11.254	0,09%
	Suku Lainnya	85.619	0,66%
	Sumatra Utara	12.930.319	100%

Sumber: Wikipedia Sumatera Utara

Berdasarkan data kependudukan pemerintah Sumatera Utara Pusat penyebaran suku-suku di Sumatra Utara, sebagai berikut:

1. Suku Batak Angkola: Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labuhanbatu, dan Kota Padangsidempuan
2. Suku Batak Mandailing: Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, dan Labuhanbatu
3. Suku Batak Simalungun: Kabupaten Simalungun, Serdang Bedagai, Kota Pematang Siantar, Kota Tebing Tinggi
4. Suku Batak Toba: Kabupaten Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Toba, Dairi, Simalungun, Tapanuli Tengah, Kota Medan, Kota Sibolga, Kota Pematang Siantar, dan Asahan
5. Suku Batak Pakpak: Kabupaten Dairi, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, dan Pakpak Barat
6. Suku Karo: Kabupaten Karo, Deli Serdang, Dairi, Langkat (bagian hulu), Kota Medan, Kota Binjai
7. Suku Melayu: Pesisir Timur, terutama di Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batubara, Asahan, Labuhanbatu, dan Kota Medan
8. Suku Nias: Pulau Nias, Kota Sibolga, Pesisir Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan
9. Suku Pesisir: Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga
10. Suku Minangkabau: Kota Medan, Kabupaten Asahan, Pesisir Barat

11. Suku Banjar: Kabupaten Langkat, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai
12. Suku Aceh: Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Langkat
13. Suku Jawa: Pesisir Timur
14. Suku Tionghoa: Perkotaan Pesisir Timur & Barat,
15. Suku Arab: Kota Medan
16. Suku India: Kota Medan, Kota Binjai, Kota Sibolga, Kota Pematangsiantar, dan Kota Tanjungbalai
17. Suku Silandang: Bukit Torsihite, Mandailing Natal.

f. Bahasa

Pada umumnya, bahasa yang dipergunakan secara luas adalah bahasa Indonesia. Suku Melayu Deli mayoritas menuturkan Bahasa Indonesia karena kedekatannya dengan bahasa Melayu yang menjadi bahasa ibu masyarakat Deli. Pesisir timur seperti wilayah Serdang Bedagai, Pangkalan Dodek, Batubara, Asahan, dan Tanjung Balai, memakai Bahasa Melayu dialek "o" begitu juga di Labuhan Batu dengan sedikit perbedaan ragam. Bahasa Melayu Asahan memiliki ciri khas yaitu pengucapan huruf R yang berbeda daripada Bahasa Melayu Deli contoh kata "cari" dibaca "caghi" dan kereta dibaca "kegheto". Di Kabupaten Langkat masih menggunakan bahasa Melayu dialek "e" yang sering juga disebut Bahasa Maya-maya. Masyarakat Jawa di daerah perkebunan, menuturkan Bahasa Jawa sebagai pengantar sehari-hari.

Di Medan, orang Tionghoa lazim menuturkan bahasa Hokkian selain bahasa Indonesia. Orang India menuturkan bahasa Tamil dan bahasa

Punjab disamping bahasa Indonesia. Di pegunungan, masyarakat Batak menuturkan Bahasa Batak yang terbagi dalam dua kelompok, yaitu Rumpun bahasa Batak utara dan selatan yang dituturkan oleh masing-masing etnis. Rumpun Selatan terdiri dari Bahasa Batak Toba, Angkola, Mandailing, dan Simalungun, sedang Rumpun Utara terdiri dari Bahasa Karo dan Bahasa Pakpak. Bahasa Nias dituturkan di Kepulauan Nias oleh suku Nias. Sedangkan orang-orang di pesisir barat, seperti Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Natal menggunakan bahasa Pesisir.

g. Agama

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik provinsi Sumatra Utara tahun 2021, mayoritas penduduk Sumatra Utara menganut agama Islam yakni 63,36%, kemudian Kristen 33,99% dimana Protestan 26,66% dan Katolik 7,33%. Kemudian Budha 2,43 %, Konghucu 0,11%, Hindu 0,10 % dan Parmalim 0,01%. [2] Sementara untuk sarana rumah ibadah, terdapat 12.499 Gereja Protestan, 10.738 Masjid, 4.822 Mushola, 2.488 Gereja Katolik, 393 Vihara, 99 Klenteng dan 84 Pura. [2]

Agama utama di Sumatra Utara berdasarkan etnis adalah:

- Islam: terutama dipeluk oleh suku Melayu, Pesisir, Minangkabau, Jawa, Aceh, Arab, Mandailing, Angkola, sebagian Karo, Simalungun, Batak Pesisir dan Pakpak

- Kristen (Protestan dan Katolik): terutama dipeluk oleh suku Batak Toba, Karo, Simalungun, Pakpak, Nias dan sebagian Batak Angkola, Tionghoa.
- Hindu: terutama dipeluk oleh suku Tamil di perkotaan
- Buddha: terutama dipeluk oleh suku Peranakan di perkotaan
- Konghucu: terutama dipeluk oleh suku Peranakan di perkotaan
- Parmalim: kepercayaan asli suku Batak Toba, sebelum ajaran agama Kristen berkembang. Penganut Parmalim banyak bermukim di kecamatan Uluan, kecamatan Lumban Julu, kecamatan Ajibata, dan kecamatan Bonatua Lunasi di kabupaten Toba.

2. Profil Balai Diklat Keagamaan Medan

a. Sejarah Badan Litbang dan Balai Diklat Keagamaan

Secara historis, institusi kelitbangan di Departemen Agama hadir pada tahun 1975 melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 18 Tahun 1975 yang mengatur pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan Agama. KMA ini merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen, dan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen. Tugas dan Fungsinya adalah penyiapan data dan informasi rancangan kebijakan.

Dinamika unit kelitbangan hadir ketika diberlakukan KMA Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen agama. KMA ini mengatur struktur organisasi yang tadinya bernama Badan Penelitian

dan Pengembangan Agama, menjadi Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan. Sesuai KMA, unit kelitbangan digabung dengan unit kediklatan yang semula berada di Sekretariat Jenderal.

Setelah berganti nama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan memiliki fungsi melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang agama dan keagamaan, sekaligus juga melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai Departemen Agama. Berubah struktur dan nomenklatur kembali terjadi saat diberlakukan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama. Pada PMA ini, organisasi berubah nama menjadi Badan Litbang dan Diklat. Pada PMA ini, tugas Badan Litbang dan Diklat adalah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan di bidang keagamaan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama. Kedudukan Badan Litbang dan Diklat semakin kokoh dengan dikeluarkannya PMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

Balai Diklat Keagamaan Medan berdiri pada tahun 1981 dengan nama Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan (BDPTK) melalui Keputusan Menteri Agama nomor 45 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kotamadya dan Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan. Pada periode ini, wilayah kerjanya adalah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 1979 sampai pada tahun 1980, ketika masih bernama Balai Penataran Guru Agama

(BPGA), wilayah kerjanya meliputi empat provinsi yaitu Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat dan Riau.

Secara organisasi, BPGA bertanggung jawab langsung kepada Sekjen Departemen Agama cq. Pusdiklat Departemen Agama. Pada periode ini, BPGA memiliki struktur sebagai berikut:

1. Kepala Balai Diklat.
2. Seksi Diklat Tata Usaha.
3. Seksi Diklat Guru Agama.
4. Seksi Diklat Tenaga Teknis Keagamaan.

BDPTK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hanya terfokus pada pegawai Administrasi, sedangkan pendidikan dan pelatihan guru masih dilaksanakan oleh Kanwil Departemen Agama Provinsi. Sejak tahun 1984, berdasarkan KMA Nomor 45 tahun 1984 Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan Padang didirikan. Saat itu Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan Padang memiliki wilayah kerja sebanyak 3 provinsi yaitu Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Dengan begitu maka Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan Medan hanya memiliki 2 wilayah kerja yaitu Sumatera Utara dan Aceh.

Sejalan dengan perkembangan pendidikan di Indonesia dan pertumbuhan madrasah di lingkungan Departemen Agama, pada tahun 2002 lahirlah instruksi Menteri Agama nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengalihan Perencanaan Program dan Anggaran serta Pelaksanaan Diklat di Lingkungan Departemen Agama. Berdasarkan Instruksi Menteri Agama tersebut, maka seluruh kegiatan diklat, baik

diklat tenaga administrasi maupun diklat tenaga teknis keagamaan sepenuhnya dilaksanakan oleh BDPTK yang selanjutnya diubah menjadi Balai Diklat Keagamaan (BDK) dan secara organisatoris bertanggung jawab kepada Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama.

Pada tanggal 24 Juni tahun 2004, lahir Keputusan Menteri Agama nomor 345 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Keagamaan dengan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Balai Diklat
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Diklat Tenaga Administrasi
4. Seksi Diklat Tenaga Teknis Keagamaan

Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, ada wacana untuk pembentukan Balai Diklat Keagamaan di Aceh. Pada tahun 2012 hal itu terwujud dengan terbitnya PMA Nomor 38 Tahun 2012 tentang Struktur dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Provinsi Aceh. Dengan berdirinya Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Provinsi Aceh, maka Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan, saat ini hanya memiliki satu wilayah kerja yaitu Provinsi Sumatera Utara

b. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 345 tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan menyebutkan bahwa Balai Diklat Keagamaan

adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama yang menangani bidang pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Agama di daerah.

Sebagai kementerian tugas dari Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tersebut, Balai Diklat Keagamaan Medan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga administratif dan tenaga teknis keagamaan di wilayah kerja Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Balai Diklat Keagamaan Medan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Menentukan visi, misi dan kebijakan Balai Diklat Keagamaan.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tenaga administratif dan tenaga teknis keagamaan.
3. Menyelenggarakan koordinasi dan pengembangan kemitraan dengan instansi operasional/instansi kerja di lingkungan Kementerian Agama dan Forum serta lembaga terkait lainnya.
4. Menyajikan dan menyajikan layanan hasil pelaksanaan tugas Balai Diklat Keagamaan.

e. Visi dan Misi

Visi:

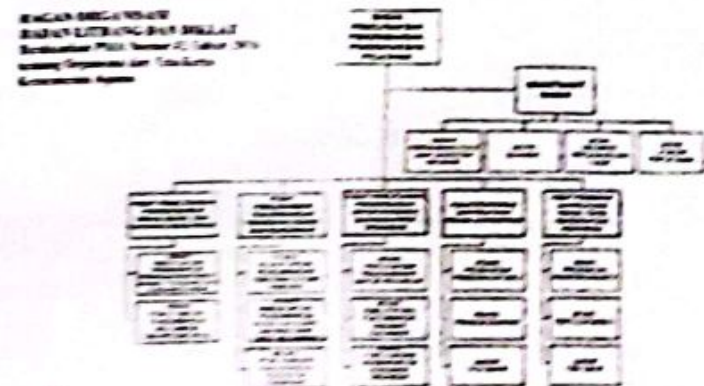
Terselenggaranya kegiatan yang profesional, berkualitas tinggi, dan akurat di Wilayah Kerja Balai Diklat Keagamaan Medan.

Misi:

1. Menyelenggarakan layanan penyelenggaraan diklat

2. Meningkatkan sarana dan prasarana diklat
3. Meningkatkan sistem informasi diklat berbasis teknologi informasi
4. Meningkatkan pemberdayaan Widyaiswara
5. Meningkatkan pembinaan alumni diklat
6. Meningkatkan kemitraan dengan lembaga terkait

d. Struktur Organisasi



Sejak berdirinya, Balai Diklat Keagamaan Medan telah dipimpin oleh delapan orang Kepala Balai Diklat sebagai berikut :

NO.	NAMA	PERIODE
1.	Dr. H. Zulkarnain Daulay	1979 s.d. 1982
2.	Dr. Sukarno	1982 s.d. 1991
3.	Dr. Muiz Anaz, M.Si.	1991 s.d. 1997

4.	H. Taufiqurrahman, S.H.	1997 s.d. 1999
5.	Drs. H. Amas Muda Siregar, M.B.A., M.M.	1999 s.d. 2002
6.	Drs. H. Ahmad Idris Siregar, M.Pd.	2002 s.d. 2006
7.	Drs. H. M. Thoha Daulay, M.M.	2006 s.d. 2012
8.	Dr. H. Syaekani, M.Ed.Adm.	2013 s.d. 2015
9.	Drs. H. Khoirul Amani, M.A.	2015 s.d. 2019
10.	Dr. Salman Alfarisi, S. Ag. M.Pd	2019 s/d 2022
11.	Drs. Muhammad Halomoan, M. Pd	2022

A. Temuan Khusus

Penguatan Konsep Moderasi Beragama bagi Masyarakat

Salah satu upaya Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) dalam melakukan perlindungan kepada umat dan kehidupan beragama di Indonesia adalah dengan menyusun suatu konsep gerakan yang disebut dengan penguatan moderasi beragama. Hal itu disampaikan Staf Khusus Menteri Agama (Stafsus Menag) RI Bidang Ukhuwah Islamiyah, Hubungan Organisasi dan Sosial Keagamaan dan Moderasi Beragama Ishfah Abidal Aziz saat memberikan materi Penguatan Moderasi Beragama bagi ASN Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, Rabu (7/9), di gedung El-Hajj Convention Center Asrama Haji Gorontalo.

"Moderasi beragama adalah mandat dari regulasi yang diberikan kepada Kemenag untuk menjadi leading sector terkait dengan penguatan moderasi beragama," ungkap Ishfah. Ishfah menjelaskan moderasi beragama itu sangat berbeda dengan moderasi agama. Moderasi beragama adalah suatu upaya untuk memoderasikan cara pandang, sikap, dan praktik beragama bukan memoderasikan agama.

Agama itu adalah anugerah atau wahyu dari Tuhan yang Maha Esa, maka pemahaman pada agama tersebut yang kemudian membentuk cara pandang, sikap dan praktik pemeluk agama.

"Moderasi beragama adalah upaya kita untuk memoderasikan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang sumbernya adalah pengetahuan kita tentang agama dan pemahaman kita terhadap teks-teks agama," jelas Stafsus Menag.

Ishfah menambahkan berawal dari hal tersebutlah Kemenag kemudian melaksanakan program prioritas penguatan moderasi beragama untuk menghadapi tiga tantangan besar.

Tiga tantangan itu antara lain, pertama berkembangnya cara pandang, sikap pemeluk agama dan praktik beragama yang mengesampingkan nilai dan martabat kemanusiaan. Kedua berkembangnya klaim kebenaran secara subyektif atas tafsir Agama dan ketiga, berkembang atau menguatnya semangat beragama yang tidak selaras dengan nilai-nilai serta komitmen berbangsa dan bernegara.

Ishfah melanjutkan, dari permasalahan besar di atas lahir lah rumusan terkait moderasi beragama yakni cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama.

Kehidupan bersama adalah yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umat yang berprinsip adil dan berimbang serta mentaati konstitusi bernegara sebagai kesepakatan bersama.

"Tiga tantangan besar di atas yang sekarang kita hadapi. Oleh karena itu sebagai bagian dari Kemenag RI yang memiliki tanggung jawab maka kita menyepakati penguatan moderasi beragama sebagai upaya untuk mengembalikan cara pandang, sikap dan praktik beragama dari persimpangan," pungkask Ishfah.

Moderasi beragama merupakan sikap tidak berlebihan dalam memahami agama yang sangat diperlukan dalam menghadapi keragaman budaya dan paham keagamaan di masyarakat. Sikap moderasi berupa pengakuan atas keberadaan pihak lain, memiliki sikap toleran, menghormati atas perbedaan pendapat dan pemahaman. dalam hal ini diertukan peran pemerintah dan dunia Pendidikan dalam mensosialisasikan, menumbuhkembangkan serta mengaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Nilai moderasi tersebut dapat di aplikasikan dalam proses pembelajaran, sehingga keak semakin banyak melahirkan generasi-generasi baru yang cinta akan keragaman dan saling menghargai asas perbedaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibnu 'Asyur, *at-Tahrir Wa at-Tamwir*, (Tunis: ad-Dar Tunisiyyah 1984
- Imarah, Muhammad. "*Islam Moderat Sebagai Penyelamat Peradaban Dunia*". *Seminar Masa Depan Islam Indonesia*, Mesir: Al-Azhar University, (2006)
- Ismail, Achmad Satori. dkk., *Islam Moderat, Menebar Islam Rahmatan lil'alam*, Jakarta: Pustaka Ikadi, (2012), Cet. II;
- Ismail, Achmad Satori., dkk, *Islam Moderat, Menebar Islam Rahmatan lil'alam*, Jakarta: Pustaka Ikadi, (2012), Cet. II
- Kamus Bahasa Indonesia edisi elektronik (Pusat Bahasa, 2008)
- Muh. Fu,ad Abdul Baqi, *Mu, jam Mufahras Li Alfaz Al-Quran al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000)
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)
- Nur, Afrizal. dan Mukhlis, "*Konsep Wasathiyah Dalam Al-Qur'an: (Studi Komparatif Antara Tafsir At-Tahrir Wa At-Tamwir Dan Aisar At-Tafsir)*", *Jurnal An-Nur*, Vol. 4, No. 2 (2015)
- Syamsul Kurniawan, *Pendidikan Karakter: Konsepsi & Implementasi Secara Terpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013)

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishah Volume 5*, Ciputat, Lentera Hati, (2010)

Shihab, M. Quraish. *Wasathiyah*, Tagerang: PT. Lentera Hati, (2019)

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Jakarta: PT Mizan Pustaka, (2013)

Thabathaba'i, Muhammad Husain. *Al-Mizan: An Exegesis of Qur'an Volume 2*, Ter. Ilyas Hasan, Jakarta: Lentera, (2010)

Yasid, Abu. *Membangun Islam Tengah*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, (2010)

Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2013)

Ellingsworth, H.W. (1983). "Adaptive intercultural communication", in: Gudykunst, William B (ed.), *Intercultural communication theory*, 195-204, Beverly Hills: Sage

Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371 Telepon 6615683-6622925 Faximile 6615683
Situs: www.fdk.uinsu.ac.id, Email: fdk@uinsu.ac.id

Nomor : B-5398/DK/DK.V.I/KS.02/10/2022
Lamp. : -
Hal : Pengambilan Data Penelitian

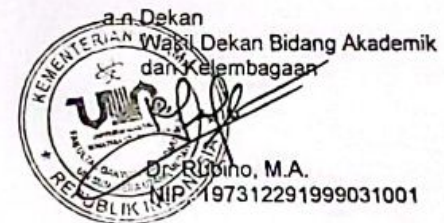
03 November 2022

Yth. 1. Kepala Balai Diklat Keagamaan Medan
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Langkat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan Pelaksanaan Penelitian Pembinaan Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi oleh Dr. Mailin, MA, dengan judul " Penguatan Komunikasi Lintas Budaya Melalui Diklat Penyuluh Agama Berbasis Nilai Kearifan lokal dalam membangun Moderasi beragama di Sumatera Utara ", maka kami mohon bantuan Saudara untuk memberikan informasi/data yang dibutuhkan untuk penyelesaian penelitian dimaksud.

Demikian disampaikan, atas bantuannya diucapkan terimakasih.



Tembusan:
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU Medan.